

Pendapatan Asli Daerah- Kepala Bapenda Makassar Imbau Warga untuk Bayar PBB Tepat Waktu



Sumber gambar:

<https://terasnews.id/kepala-bapenda-makassar-imbau-warga-untuk-bayar-pbb-tepat-waktu/html>

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mengimbau seluruh warga untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu. Kesadaran masyarakat dalam membayar PBB akan berdampak positif pada pembangunan daerah.

Kepala Bapenda Makassar, Firman Hamid Pagarra, menekankan pentingnya pembayaran PBB bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk pembangunan Kota Makassar.

“Kami mengimbau masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu dan tepat jumlah. Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi PAKINTA atau Bank Sulselbar,” kata Firman pada Jumat, 7 Juni 2024.

Petugas Bapenda Makassar juga menggunakan mobil dengan pengeras suara untuk menyusuri jalan-jalan di Kota Makassar, menyampaikan informasi pembayaran PBB kepada warga. “Mari kita bayar PBB tepat waktu dan tepat jumlah demi pembangunan Kota Makassar,” ujar Firman.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Firman Hamid Pagarra juga mengucapkan terima kasih kepada warga Makassar yang sudah membayar pajak PBB tepat waktu dan tepat jumlah, menunjukkan bukti cinta mereka kepada Kota Makassar.

Dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB, diharapkan pembangunan di Kota Makassar dapat terus berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh warganya.

Adapun dalam hal tersebut, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar tahun 2023 kembali mengecewakan, gagal mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp1,48 triliun. Hingga kini, PAD baru menginjak angka Rp1,38 triliun lebih, masih jauh dari yang diharapkan.

Distribusi daerah juga menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan, hanya mencapai Rp68,51 miliar dari target Rp 204,12 miliar, atau sekitar 33,56 persen. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pun tidak lebih baik, hanya mencapai Rp27,20 miliar lebih dari target Rp88,26 miliar.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, menyampaikan bahwa target PAD sebesar Rp2 triliun baru akan tercapai pada tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah tahun 2021-2026.

“Proyeksi pendapatan menunjukkan bahwa pendapatan sebesar Rp2 triliun akan dicapai pada tahun 2025. Realisasi PAD dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan, dari Rp 1,3 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp 1,5 triliun lebih pada tahun 2023, dengan kenaikan sebesar 12 persen. Ini merupakan sejarah penerimaan PAD mencapai Rp 1,5 triliun lebih,” ujar Danny Pomanto.

Danny Pomanto juga memaparkan strategi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan PAD di masa depan, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Selain itu, peningkatan pengawasan dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH), peningkatan pelayanan kepada masyarakat, edukasi dan sosialisasi, serta optimalisasi penggunaan sistem cashless dalam pelayanan retribusi daerah.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Kebocoran Pendapatan

Kendati begitu, Danny Pomanto juga mengakui adanya indikasi kebocoran pendapatan di Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Makassar.

Ia menyebutkan kurangnya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pengawasan pendapatan, terutama pada Perumda Parkir yang memiliki potensi pendapatan besar namun belum dikelola dengan optimal.

Perumda Parkir, kata Danny, telah mulai melaksanakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan dan pengawasan internal, yang berdampak pada kenaikan setoran dividen sebesar Rp 2 miliar lebih, atau hampir 300 persen dari tahun sebelumnya.

“Dalam tahap selanjutnya, terkait pengelolaan dan pengawasan eksternal, saat ini kami menunggu terbentuknya regulasi Ranperda tentang pengelolaan yang telah diajukan oleh Perumda Parkir kepada legislatif melalui Komisi B DPRD Kota Makassar. Jika regulasi ini disetujui dan memenuhi kajian yang terukur, tidak menutup kemungkinan target Rp1 triliun dapat tercapai sesuai harapan dewan yang terhormat,” tutup Danny Pomanto.

Kinerja pemerintah kota dalam mencapai target PAD menjadi sorotan utama, mengingat masih banyaknya tantangan yang harus dihadapi, mulai dari optimalisasi sumber pendapatan hingga pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran.

Upaya perbaikan yang direncanakan diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam penerimaan daerah, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sumber Berita:

1. <https://terasnews.id/kepala-bapenda-makassar-imbau-warga-untuk-bayar-pbb-tepat-waktu/html>
2. <https://makassar.terkini.id/pendapatan-asli-daerah-pad-kota-makassar-melenceng-dari-target/>

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.